

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk dapat lebih kompetitif dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan dari masa ke masa. Selain itu, perusahaan tidak hanya dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, tetapi perusahaan juga harus mampu mengelola keuangannya dengan baik karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Dalam mengelola keuangan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Pemenuhan dana tersebut dapat dilakukan dengan pendanaan internal maupun eksternal. Perusahaan yang tidak memiliki modal yang cukup dari internal perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi usahanya yaitu dari laba ditahan, dapat memperoleh tambahan modal dari pihak luar (eksternal) berupa hutang dan saham. Apalagi bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, pasti membutuhkan tambahan modal yang lebih besar.

Tambahan modal dari pihak luar salah satunya dapat diperoleh dari hutang. Hutang merupakan salah satu alternatif sumber dana dari pihak lain (kreditur) untuk memperoleh dana yang kemudian digunakan perusahaan untuk tambahan

dana maupun melakukan ekspansi. Hutang akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan karena harus mengembalikan pokok pinjaman (*principal*) dan juga bunganya. Walaupun demikian, dalam menggunakan dana eksternal sebagian perusahaan menganggap bahwa penggunaan hutang dirasa lebih aman dibandingkan dengan menerbitkan saham baru (Narita, 2012). Menurut Babu dan Jain (1998) dalam Siregar (2006) terdapat empat alasan mengapa perusahaan lebih menyukai menggunakan hutang daripada saham baru, yaitu karena adanya manfaat pajak atas pembayaran bunga, biaya transaksi pengeluaran hutang lebih murah daripada biaya transaksi emisi saham baru, lebih mudah mendapatkan pendanaan hutang daripada pendanaan saham, dan kontrol manajemen lebih besar adanya hutang baru daripada saham baru.

Analisa manajemen dalam keputusan pendanaan melalui hutang menjadi sangat penting bagi perusahaan. Penentuan kebijakan hutang perusahaan merupakan salah satu tugas penting dari manajer karena akan berpengaruh pada aktivitas dan risiko yang akan dihadapi perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri untuk memutuskan seberapa besar hutang yang digunakan untuk membiayai bisnisnya dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus mengurangi risiko keuangan perusahaan. Terkadang kecenderungan perusahaan yang semakin banyak menggunakan hutang, tanpa disadari secara berangsur-angsur akan menimbulkan kewajiban yang semakin berat bagi perusahaan saat harus melunasi hutang tersebut. Tidak jarang perusahaan-perusahaan akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dan bahkan dinyatakan bangkrut.

Steven dan Lina (2011 : 164) menyatakan bahwa pendanaan dengan menggunakan hutang yang terlalu tinggi akan meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan pada akhirnya bisa mengakibatkan perusahaan masuk ke dalam krisis (*financial distress*). Akan tetapi, perusahaan juga perlu memanfaatkan fasilitas kredit yang yang diberikan oleh pihak lain dengan baik juga untuk menunjang operasional perusahaan. Dengan kebijakan hutang yang tepat akan meningkatkan harga saham perusahaan, sehingga kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat.

Belakangan ini terdapat beberapa kasus bangkrutnya perusahaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pengambilan keputusan pendanaan. Perusahaan tersebut dinilai gagal dalam melunasi hutang yang telah diambil. Salah satunya adalah kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan maskapai penerbangan swasta nasional Batavia Air. Perusahaan maskapai penerbangan nasional ini terbukti tidak mampu membayar hutangnya dalam perjanjian sewa pesawat kepada *International Lease Finance Corporation (ILFC)* yang berkantor pusat di Amerika Serikat sebesar 4.688.064,07 dolar AS hingga jatuh tempo per 13 Desember 2012. Dalam perkara ini, Batavia Air juga terbukti mempunyai utang dengan kreditur lain, *Sierra Leasing Limited* yang juga berasal dari perjanjian sewa pesawat. Akibat tidak sanggup membayar hutangnya, Batavia Air pun akhirnya dipailitkan (*Sumber : www.detik.com*).

Dengan melihat kasus tersebut, perusahaan perlu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pendanaan yang tepat yang terkait dengan kebijakan hutang agar dapat mengurangi risiko kebangkrutan. Menurut Brigham

dan Houston (2001 : 39) dalam Suprianto (2009) terdapat banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pendanaan yang secara umum terdiri dari faktor stabilitas penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan.

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan hutang adalah pajak. Pajak merupakan pungutan yang dikenakan perusahaan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang dalam menyediakan barang maupun jasa. Peraturan pajak memperlakukan biaya yang timbul dari penggunaan hutang ini secara berbeda. Bunga dalam peraturan perpajakan bersifat *tax deductible*, yaitu bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya usaha sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. Semakin besar hutang perusahaan, maka pajak yang terhutang menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sedangkan dividen sebagai imbalan bagi pemegang saham bersifat *non tax deductible*, yaitu dividen tidak dapat dikurangkan sebagai biaya usaha karena sifatnya yang merupakan distribusi keuntungan sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. Pembayaran dividen dilakukan setelah perhitungan pajak terhutang, oleh karena itu tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terhutang. Nainggolan (2005) menyatakan bila maksimalisasi nilai perusahaan (*value of the firm*) digunakan sebagai acuan dalam pemilihan pembiayaan usaha, maka *leveraged firms* akan lebih besar nilainya dibandingkan

unleveraged firms karena adanya keuntungan pajak yang timbul dari hutang (*tax shields*).

Pengenaan pajak penghasilan dengan tarif tunggal membuat perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih tinggi pula. Dengan demikian, bila perusahaan dengan laba tinggi dan memiliki hutang, maka biaya bunga akan semakin bermanfaat bagi perusahaan karena mengurangi pajak terhutang sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena pada dasarnya, perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan beban sehingga berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Namun apabila perusahaan tidak hati-hati dalam menggunakan hutang yang tinggi maka akan membawa kesulitan membayar bunga dan pokok pinjaman yang akan berdampak pada probabilitas kebangkrutan perusahaan yang juga semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2009) menyatakan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat hutang. Selain itu penelitian Chen (2010) juga menyatakan bahwa *tax* berpengaruh signifikan terhadap tingkat hutang.

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan hutang adalah struktur aset. Struktur aset merupakan aset tetap perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan kepada kreditur. Dalam memberikan pinjaman, kreditur sering kali meminta jaminan berupa aset tetap kepada perusahaan. Kreditur akan lebih mempercayai perusahaan yang memiliki jaminan atas hutangnya dalam jumlah yang besar. Karena apabila perusahaan mengalami *default*, yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya, maka perusahaan

dapat menjual aset tetapnya sebagai sumber dana untuk melunasi kembali hutang beserta bunga yang ditanggung perusahaan.

Myers dan Majluf dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa komposisi nilai jaminan aset perusahaan akan mempengaruhi sumber pendanaan. Perusahaan yang asetnya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan hutang. Sebaliknya, semakin rendah aset tetap dari suatu perusahaan, maka kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin hutang jangka panjangnya semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan Lina (2011) menemukan bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang karena aset tetap tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang dari kreditur. Chiarella et al. dalam WA Sulistyowati (2009) juga menyatakan bahwa tanpa adanya aset yang dapat dijamin, biaya pinjaman cenderung menjadi tinggi (kreditur dapat meminta bunga pembayaran hutang yang tinggi). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vitriasari dan Indarti (2010) menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh negatif terhadap tingkat hutang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suprianto (2009) yang menguji pengaruh *corporate tax rate* terhadap tingkat hutang pada perusahaan *financial* yang terdaftar di BEI tahun 2004-2008. Keterbaruan penelitian ini adalah peneliti menguji pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sesuai dengan saran penelitian sebelumnya dan juga diharapkan dapat menghasilkan simpulan yang dapat membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya karena jumlah perusahaan manufaktur

lebih banyak dibandingkan sektor lain. Tahun sampel penelitian ini menggunakan tahun 2009-2011 agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Selain itu peneliti juga mencoba menambahkan struktur aset sebagai variabel independen. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Tax* dan Stuktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan hendak diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *corporate tax* terhadap kebijakan hutang?
2. Apakah terdapat pengaruh antara struktur aset terhadap kebijakan hutang?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *corporate tax* dan struktur aset secara bersama-sama terhadap kebijakan hutang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *corporate tax* terhadap kebijakan hutang.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *corporate tax* dan struktur aset secara bersama-sama terhadap kebijakan hutang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi Kalangan Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam memilih sumber pendanaan hutang perusahaan yang tepat, dimana setiap kebijakan hutang yang diambil harus sesuai dengan porsinya.

3. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

4. Bagi Kreditur

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.